



Nilai Aksiologi dan Strategi Legitimasi dalam Wacana Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Wida Mulyanti^{1*}, Syihabuddin¹, Mahardhika Zifana¹, Mely Rizki Suryanita¹, Rony Wirachman¹

¹Universitas Pendidikan Indonesia

*Correspondence: widamulyanti@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembentukan nilai-nilai dalam wacana kebijakan ekonomi melalui analisis kritis pidato Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Great Lecture "Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8%" (11 September 2025). Dengan menggabungkan Analisis Wacana Kritis model Fairclough dan kajian nilai (aksiologi), penelitian ini menganalisis tiga tingkat kajian, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga nilai utama yang saling berinteraksi. Pertama, nilai pragmatis-instrumental, yang menekankan efisiensi, target terukur, dan pemanfaatan teknologi sebagai dasar kebijakan. Kedua, nilai etika sosial, yang tampak dalam penekanan pada inklusivitas, keadilan distribusi, dan pemerataan kesempatan. Ketiga, nilai estetika komunikatif, yang membingkai kebijakan teknis dalam bentuk narasi visioner untuk membangun rasa kebersamaan publik. Analisis menunjukkan bahwa ketiga nilai tersebut berfungsi membangun legitimasi kebijakan: nilai pragmatis memberikan kesan kredibilitas teknis, nilai etika sosial memberikan pembenaran moral, dan nilai estetika menciptakan keterikatan emosional dengan publik. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya potensi kesenjangan antara nilai-nilai yang dikonstruksikan dalam wacana dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan kritis terhadap hubungan antara janji wacana kebijakan dan implementasinya secara nyata.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Nilai Aksiologi; Wacana Kebijakan Ekonomi; Strategi Legitimasi; Pidato Menteri Keuangan

Received: 18 Des 2025; Revised: 17 Jan 2026; Accepted: 19 Jan 2026; Available Online: 2 Juni 2026

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pidato kebijakan dalam lanskap komunikasi pemerintahan kontemporer telah mengalami transformasi mendasar: dari sekadar medium penyampai informasi menjadi situs kompleks di mana nilai-nilai, ideologi, dan relasi kuasa dikonstruksi, dinegosiasikan, dan diperebutkan (Pešić, 2022). Transformasi ini mencerminkan pergeseran dalam cara negara modern melegitimasi keputusan-keputusan politis dan ekonomi, tidak lagi hanya melalui otoritas formal, tetapi melalui persuasi diskursif yang terstruktur.

Pidato Menteri Keuangan memiliki peran komunikatif yang unik dalam ekosistem ini. Ia harus menjembatani tuntutan yang kerap bertolak belakang: membangun kredibilitas teknis dan kepercayaan di mata pasar keuangan global, sekaligus merumuskan narasi yang resonan secara moral dan politis untuk memobilisasi dukungan publik domestik (Knoepfel, et al., 2022). Titik pertemuan yang penuh ketegangan inilah yang menjadikan pendekatan aksiologis, yakni analisis terhadap fondasi nilai dan konsepsi "kebaikan", sangat relevan untuk membedah strategi diskursif dalam komunikasi kebijakan ekonomi (Davis & Knauss, 2013; Enke, 2024).

Pidato Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Great Lecture 11 September 2025, bertajuk "Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8%", menawarkan konteks empiris yang strategis untuk eksplorasi semacam itu. Penting untuk dipertegas bahwa pidato ini bukan ekspresi individual atau refleksi pribadi pembicara, melainkan representasi diskursus negara yang terstruktur secara institusional, mencerminkan posisi, kepentingan, dan strategi komunikasi pemerintahan secara kolektif. Dengan demikian, analisis ini menargetkan logika wacana institusional, bukan motivasi personal penutur.

Disampaikan pada momen kritis pasca pengangkatannya di tengah transisi administrasi, pidato ini beroperasi dalam medan tekanan ganda: di satu sisi, ia harus menunjukkan kesinambungan dan kestabilan kebijakan kepada komunitas investor, sambil menandai kebaruan dan arah strategis pemerintahan baru; di sisi lain, ia perlu merespons sentimen nasionalis dan tuntutan keadilan domestik, sambil tetap menjaga pintu investasi global terbuka (Gabel, 2023).

Penelitian empiris dalam komunikasi politik dan analisis wacana telah lama mencatat bahwa elit pemerintah secara sengaja mengonstruksi wacana kebijakan melalui strategi retorika dan aksiologis berlapis-lapis, bertujuan membentuk "akal sehat" hegemonik bahwa suatu kebijakan tidak hanya tepat, tetapi juga perlu dan tak terelakkan (Suhardi & Salamah, 2025; Udris-Borodavko, et al., 2023; Hatherell & Welsh, 2021). Namun, berbeda dari penelitian sebelumnya yang menekankan aspek teknokratik dan respons geopolitik kebijakan ekonomi, penelitian ini menawarkan pembacaan baru dengan menempatkan nilai-nilai aksiologis (pragmatis-instrumental, etika sosial, dan estetika komunikatif) sebagai strategi utama legitimasi kebijakan dalam konteks transisi politik pasca-2024 dan gaya komunikasi yang khas, langsung, kontroversial, dan berorientasi pada authenticity yang menciptakan fenomena wacana unik di mana performa keberanian menjadi komoditas politis sekaligus sumber risiko legitimasi.

Berdasarkan identifikasi celah tersebut, pertanyaan penelitian utama dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana nilai-nilai aksiologi termanifestasi, berinteraksi, dan berfungsi secara strategis dalam pidato Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membangun legitimasi kebijakan dan hegemoni konsensus?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan spesifik: (1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sistem nilai aksiologi dominan dalam teks pidato melalui analisis linguistik mikro; (2) Menganalisis mekanisme retorika aksiologis yang digunakan untuk membingkai kebijakan teknis menjadi narasi persuasif; (3) Menginterpretasikan fungsi strategis dari interaksi nilai-nilai tersebut dalam membangun legitimasi dan konsensus hegemonik; serta (4) Mengidentifikasi potensi disjungsi atau ketegangan antara klaim nilai dalam wacana dengan kapabilitas implementasi dan realitas kebijakan.

Signifikansi penelitian ini hadir pada tiga level: Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan tiga ranah kajian yang sering berjalan parallel, Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995), Aksiologi (filsafat nilai), dan teori legitimasi/hegemoni dalam studi politik, menghasilkan kerangka analitik inovatif. Secara praktis, penelitian ini menyediakan alat literasi kritis bagi jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membaca bagaimana nilai dan emosi dimobilisasi dalam pesan kebijakan ekonomi. Secara kontekstual, di tengah agenda menuju Indonesia Emas 2045, penelitian ini berkontribusi pada diskursus publik tentang akuntabilitas, konsistensi narasi, dan kualitas deliberasi kebijakan di Indonesia.

METODE

Pendekatan dan Desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang berlandaskan paradigma kritis, dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2017). Paradigma kritis memandang realitas sosial sebagai konstruksi diskursif yang dibentuk oleh relasi kuasa, kepentingan ideologis, dan praktik hegemonik, sehingga menempatkan peneliti tidak sekadar sebagai pengamat netral, melainkan sebagai analis yang bertanggung jawab untuk mengungkap asumsi normatif, ideologi tersembunyi, dan potensi ketidaksetaraan yang direproduksi melalui wacana (Pešić, 2022).

Desain studi kasus tunggal digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu peristiwa komunikatif spesifik, pidato kebijakan ekonomi pada momen transisi kritis, yang diperlakukan sebagai bounded system dengan konteks institusional, historis, dan sosiopolitik yang jelas dan relevan untuk mengungkap mekanisme legitimasi wacana kebijakan ekonomi di era kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana wacana kebijakan tidak hanya merepresentasikan realitas ekonomi, tetapi juga secara aktif membentuk dan melegitimasi struktur kekuasaan tertentu.

Data dan Sumber Data

Data primer penelitian ini berupa transkrip lengkap pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang disampaikan pada 11 September 2025, dengan durasi sekitar 37 menit 30 detik dan jumlah kata 8.347. Transkrip diperoleh dari situs resmi dan saluran YouTube Kementerian Keuangan

Republik Indonesia, kemudian diverifikasi melalui proses penyalarsan ulang dengan rekaman audiovisual untuk memastikan akurasi linguistik.

Untuk memahami pidato sebagai praktik sosial yang terembed dalam jaringan diskursus institusional yang lebih luas, penelitian ini melengkapi data primer dengan data sekunder berupa profil profesional pembicara, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045, serta liputan media arus utama terkait kebijakan ekonomi nasional. Data sekunder ini berfungsi untuk mengontekstualisasikan pidato dalam relasi intertekstualitas dengan dokumen kebijakan resmi lainnya dan untuk memperkuat analisis pada fase praktik sosial, sehingga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai aksiologis dalam pidato terkoneksi dengan wacana institusional yang lebih luas dan fungsi hegemoniknya dalam membangun konsensus publik.

Operasionalisasi Identifikasi Nilai Aksiologi

Nilai-nilai aksiologi dalam teks pidato diidentifikasi melalui tiga fase operasionalisasi Analisis Wacana Kritis (CDA) (Fairclough, 1995):

Fase 1 – Analisis Teks (Level Linguistik Mikro)

Pada tahap ini, analisis difokuskan pada struktur linguistik teks pidato. Peneliti mengidentifikasi secara sistematis leksikon dan kata kunci bermuatan nilai, penggunaan modalitas (misalnya "harus," "perlu," "dapat") yang menandakan derajat keharusan, legitimasi, dan urgensi kebijakan, serta metafora konseptual yang mengkonkretkan nilai-nilai abstrak ke dalam bingkai pemahaman tertentu (Lakoff & Johnson, 1980; Anber, 2023). Selain itu, analisis transitivitas dalam klausa digunakan untuk mengungkap relasi aktor, proses, dan tujuan kebijakan, sehingga memperlihatkan siapa yang diposisikan sebagai agen, penerima manfaat, atau pihak yang terdampak. Melalui analisis mikro ini, pola nilai aksiologi—seperti nilai pragmatis-instrumental, etika sosial, dan estetika komunikatif—diidentifikasi dan dikodifikasi secara tematik.

Fase 2 – Analisis Praktik Wacana

Tahap ini menganalisis proses produksi dan konsumsi wacana. Analisis mencakup latar belakang teknokratis dan pengalaman pasar modal pembicara, konteks sosiopolitik masa transisi pemerintahan, serta karakteristik audiens yang heterogen, termasuk akademisi, praktisi keuangan, media, dan publik umum. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tertentu dipilih, ditonjolkan, atau dimarginalkan secara strategis sesuai dengan tujuan komunikatif dan konteks institusional pidato.

Fase 3 – Analisis Praktik Sosial

Pada tahap ini, pidato dianalisis sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas. Peneliti mengkaji intertekstualitas antara pidato dan dokumen kebijakan resmi lainnya, merekonstruksi ideologi yang mendasari pemilihan nilai-nilai aksiologi tertentu, serta menganalisis fungsi hegemonik wacana dalam membangun konsensus publik mengenai kelayakan dan keharusan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Validasi Kredibilitas

Kredibilitas penelitian dijaga melalui tiga mekanisme: pertama, validasi pakar dilakukan melalui diskusi hasil analisis dengan dua akademisi yang memiliki keahlian dalam analisis wacana dan kebijakan ekonomi, dengan tujuan khusus untuk memvalidasi interpretasi analitis dan konsistensi penafsiran nilai-nilai aksiologis, bukan untuk memverifikasi data primer; kedua, penelitian ini dilengkapi dengan audit trail yang mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses analisis, mulai dari pengumpulan data, prosedur pengodean tematik, catatan analitis per fase CDA, hingga revisi interpretatif sehingga transparansi metodologis dapat dilacak; dan ketiga, peneliti menerapkan prinsip reflektivitas, dengan secara eksplisit mengakui posisi epistemologis, orientasi nilai, dan potensi bias pribadi dalam menafsirkan wacana kebijakan, guna meningkatkan akuntabilitas analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Aksiologis dan Struktur Makro Pidato

Analisis teks mengungkap struktur pidato yang mereproduksi pola aksiologis spesifik. Pembukaan (Diagnosis Kritis) didominasi nilai pragmatis-instrumental dengan presentasi data stagnasi ekonomi. Bagian kedua (Visi Transformatif) meningkatkan porsi nilai estetika komunikatif melalui narasi visioner tentang target

8%. Bagian ketiga (Pilar Strategis) kembali menonjolkan nilai pragmatis dengan penjabaran mekanisme kebijakan teknis, yang dikaitkan dengan manfaat etika sosial. Penutup (Seruan Aksi) mengharmonisasikan ketiga nilai dalam crescendo naratif yang mobilisasi. Struktur ini adalah pilihan aksiologis yang dirancang untuk tujuan persuasif multipel.

Nilai Pragmatis-Instrumental: Efisiensi, Target, dan Teknologi

Nilai ini termanifestasi kuat melalui leksikon seperti "target 8%", "efisiensi", "teknologi AI", dan "berbasis data" (lebih dari 45 kemunculan untuk "target/pertumbuhan 8%"). Metafora konseptual yang dominan adalah metafora mesin/sistem teknik (ekonomi sebagai mesin yang perlu disetel) dan metafora aliran (akselerasi, lompatan), yang membingkai ekonomi sebagai objek yang dapat dikontrol dan dioptimasi secara teknis. Analisis transitivitas menunjukkan pemerintah sebagai agen aktif ("Kami akan mereformasi"), sementara penerima manfaat seperti UMKM sering muncul sebagai patient dalam konstruksi pasif ("UMKM diberdayakan").

Secara strategis, nilai pragmatis berfungsi membangun kredibilitas manajerial pemerintah, merasionalisasi dan mendepolitisasi masalah ekonomi sebagai persoalan teknis semata, serta menyelaraskan wacana dengan ekspektasi investor internasional. Namun, terdapat risiko komodifikasi nilai, di mana efisiensi dan target kuantitatif berpotensi mengesampingkan keadilan kontekstual dan kesejahteraan manusia.

Nilai Etika Sosial: Inklusivitas, Keadilan, dan Pemberdayaan

Nilai ini diartikulasikan melalui leksikon kunci seperti "inklusif" (25 kemunculan), "keadilan" (18), "pemberdayaan" (15), "UMKM", dan "tidak ada yang tertinggal". Modalitas deontik ("kita harus memastikan") meningkat saat membahas isu ini, menegaskan imperatif moral. Pidato menyajikan tiga jenis argumen: moral (hak seluruh rakyat), prudensial (inklusivitas untuk stabilitas), dan instrumental (pemberdayaan UMKM itu efisien). Menteri juga menjabarkan mekanisme kebijakan seperti inklusi finansial dan pelatihan vokasi, memberikan spesifisitas pada janji inklusivitas.

Fungsi strategis nilai etika sosial adalah melegitimasi kebijakan secara moral terhadap target ambisius, menyerap tuntutan kontra-hegemonik (keadilan) ke dalam narasi resmi, serta membangun koalisi lintas kelompok sosial. Namun, analisis mengidentifikasi potensi ketegangan dengan nilai pragmatis, khususnya jika trade-off antara pertumbuhan tinggi dan pemerataan yang adil tidak diakui secara transparan dalam wacana.

Nilai Estetika Komunikatif: Narasi Visioner dan Resonansi Emosional

Nilai ini dimanifestasikan melalui struktur naratif klasik (karakter, konflik, resolusi) yang mudah diingat dan menggerakkan. Bahasa puitis dan pencitraan ("titik balik sejarah", "membangun katedral ekonomi baru") mendominasi pembukaan dan penutup. Metafora transformatif seperti perjalanan, kelahiran kembali, dan arsitektur digunakan untuk membingkai transformasi ekonomi. Fitur prosodi seperti pengulangan anaforik dan paralelisme menciptakan ritme dan momentum yang engaging.

Secara strategis, nilai estetika berfungsi membuat kebijakan teknis menjadi resonan secara emosional, membangun identitas dan agensi kolektif melalui kata ganti "kita", serta menginspirasi dan memobilisasi publik. Namun, kekuatan narasi ini berisiko menimbulkan substitusi simbolik, di mana wacana yang inspiratif tidak diikuti implementasi substantif, yang dapat menimbulkan kekecewaan dan sinisme.

Interaksi Nilai dan Orkestrasi Strategi

Ketiga nilai tidak beroperasi sendiri-sendiri, melainkan diorkestrasi dalam urutan yang strategis. Pembukaan didominasi nilai pragmatis untuk daya tarik rasional. Visi transformatif dinaungi nilai estetika untuk keterlibatan emosional. Penjabaran kebijakan teknis dikembalikan ke nilai pragmatis, namun dikaitkan dengan manfaat etika sosial. Penutup mengharmonisasikan ketiganya. Orkestrasi ini menyediakan banyak titik masuk bagi berbagai segmen audiens: investor tertarik pada nilai pragmatis, aktivis sosial pada nilai etika, dan publik umum pada nilai estetika. Dengan demikian, pidato berupaya membangun konsensus koalisi luas mengenai legitimasi kebijakan transformasi.

Konstruksi Hegemoni melalui Konsensus Nilai

Dalam kerangka Gramscian, pidato ini merupakan praktik konstruksi hegemoni, yaitu pembuatan consent melalui kepemimpinan kultural-intelektual, bukan pemaksaan. Dengan membingkai transformasi ekonomi sebagai secara teknis sound, secara moral necessary, dan secara kolektif inspiring, pidato menciptakan

"akal sehat" baru. Keberhasilan proyek hegemoni ini bergantung pada: (1) keselarasan antara wacana dan praktik implementasi; (2) akomodasi strategis terhadap tuntutan kontra-hegemonik (seperti keadilan) ke dalam narasi resmi; serta (3) reproduksi hegemoni melalui berbagai situs kelembagaan dan media.

Risiko dan Kerentanan Diskursif: Disjungsi antara Wacana dan Realitas

Analisis ini mengidentifikasi sejumlah kerentanan pada level wacana yang berpotensi memengaruhi kredibilitas narasi kebijakan apabila tidak dikelola secara komunikatif. Perlu ditegaskan bahwa temuan ini merupakan implikasi diskursif, yakni pembacaan atas ketegangan, ambiguitas, dan potensi pelemahan makna dalam konstruksi wacana, bukan evaluasi terhadap kebijakan publik maupun kinerja implementasinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai dikonstruksi dan dilegitimasi secara linguistik dan retorik, bukan pada efektivitas kebijakan secara substantif.

Kerentanan diskursif tersebut dapat diringkas ke dalam tiga kategori utama: Pertama, ketegangan nilai yang tidak dielaborasi. Wacana menggabungkan target pertumbuhan tinggi yang bersifat pragmatis-instrumental dengan tujuan pemerataan yang berlandaskan etika sosial, tanpa secara eksplisit mengakui atau membahas potensi trade-off di antara keduanya. Pada level diskursif, absennya negosiasi atas ketegangan ini berisiko menyederhanakan kompleksitas nilai yang secara inheren saling berkompetisi.

Kedua, over-signifikasi dan ambiguitas makna. Istilah seperti pertumbuhan inklusif digunakan secara berulang sebagai penanda normatif, namun tanpa penjelasan mekanisme yang konsisten. Pada level wacana, kondisi ini berpotensi mengosongkan makna istilah tersebut, sehingga konsensus publik dibangun lebih melalui ambiguitas simbolik daripada kejelasan konseptual.

Ketiga, pluralisme ideologis yang rapuh. Wacana memadukan unsur teknokratis, etika sosial, dan nasionalisme secara simultan untuk menjangkau audiens yang luas. Namun, pada level diskursif, koeksistensi ideologis ini tidak disertai kerangka penjabaran yang secara eksplisit mengharmonisasi atau menegosiasikan potensi ketegangan antarprinsip tersebut. Secara keseluruhan, kerentanan ini tidak secara langsung mengindikasikan kegagalan kebijakan, tetapi menunjukkan bahwa legitimasi wacana bertumpu pada fondasi yang masih dapat diperkuat melalui elaborasi yang lebih jelas mengenai mekanisme, batasan, dan relasi antar nilai yang diartikulasikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidato Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikonstruksi melalui orkestrasi tiga nilai aksiologi yang saling memperkuat, yaitu nilai pragmatis-instrumental (40–45% pidato) yang membangun legitimasi teknis dan kredibilitas manajerial, nilai etika sosial (30–35%) yang menyediakan justifikasi moral berbasis keadilan dan inklusivitas, serta nilai estetika komunikatif (25–30%) yang menciptakan koherensi naratif dan resonansi emosional. Interaksi strategis ketiga nilai tersebut berfungsi membangun hegemoni konsensus atas legitimasi wacana transformasi ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi melalui integrasi Analisis Wacana Kritis dan aksiologi, operasionalisasi CDA dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia, serta konseptualisasi hegemoni nilai dalam wacana kebijakan. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya pembacaan kritis oleh media dan masyarakat sipil, serta perlunya transparansi pemerintah dalam mengartikulasikan batasan dan trade-off kebijakan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus pada teks tertulis dan penggunaan studi kasus tunggal, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan analisis multimodal, studi resepsi audiens, pendekatan longitudinal, dan kajian komparatif guna menelusuri relasi antara konstruksi nilai dalam wacana dan praktik kebijakan yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Anber, M. M. (2023). Metaphor in political discourse. *Journal of Tikrit University for Humanities*, 30(12), 336–345. <https://doi.org/10.25130/jtuh.30.12.2.2023.28>
- Butler, R. (Ed.). (2024). *Political discourse analysis: Legitimation strategies in crisis and conflict*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781399523202>
- Davis, L. S., & Knauss, M. (2013). The moral consequences of economic growth: An empirical investigation. *The Journal of Socio-Economics*, 42, 43–50. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2012.11.007>

- Enke, B. (2024). Morality and political economy from the vantage point of economics. *PNAS Nexus*, 3, pgae309. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae309>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Gabel, S. G. (2023). Economic justice. In *A human rights-based approach to justice in social work practice* (pp. 123–136). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197570647.003.0010>
- Hakimah, Y. (2025). Monetary and fiscal policy: Drivers of stability in developing economies. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.29210/1135100>
- Hatherell, M., & Welsh, A. (2021). The technocratic national narrative in Indonesia. In *The struggle for the national narrative in Indonesia* (pp. 25–52). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3862-8_2
- Hoggan, C. (2024). Metaphors of transformation: Revealing and concealing [Editorial]. *Journal of Transformative Education*, 22(3), 223–228. <https://doi.org/10.1177/15413446241259057>
- Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2022). Introduction. In *Public policy analysis* (pp. 1–17). Policy Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Listiana, Y., Yumame, J., & Pugu, M. (2025). Public policy implementation: Challenges and solutions in achieving people's welfare. *MorFAI Journal*, 5(1), 442–445. <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i1.2642>
- Masduki. (2020). Blunders of government communication: The political economy of COVID-19 communication policy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 97–111. <https://doi.org/10.22146/jsp.57389>
- Pešić, M. (2022). Critical discourse analysis as a critical social study: Norman Fairclough's approach. *Politička Revija*, 74(4). <https://doi.org/10.22182/pr.7442022.4>
- Suhardi, & Salamah. (2025). Bahasa sebagai alat hegemoni: Studi literatur tentang wacana media. *Journal Media Public Relations*, 5(1), Article 8. <https://doi.org/10.47233/jmpr.v5i1.1756>
- Udris-Borodavko, N., Oliinyk, V., Bozhko, T., Budnyk, A., & Hordiichuk, Y. (2023). Aesthetics and semiotics in 21st century visual communications: Pedagogical and sociocultural aspects. *Research Journal in Advanced Humanities*, 4(4). <https://doi.org/10.58256/rjah.v4i4.1144>
- Wicaksana, I. G. W. (2021). Economic nationalism for political legitimacy in Indonesia. *Journal of International Relations and Development*, 24, 27–50. <https://doi.org/10.1057/s41268-019-00195-3>
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.